

ISSN 0854-6460

MISYKAT
AL-ANWAR
Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer

Volume 20, Nomor 7, Juni 2012

Melatih Kecerdasan Emosi bagi Anak Usia Dini
Rika Sa'diyah

مفهوم الجهاد في ضوء القرآن الكريم
Siti Zuhriyah

Penerapan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan KPR-iB
Asep Supyadillah

Peranan Orang Tua dalam Mendidik Karakter Anak
Busahdiar

Pemanfaatan Perpustakaan Madrasah sebagai Sumber Belajar
Eva Fitriati

Peran Lembaga PAUD dalam Melakukan Deteksi Dini
Suharsiwi

Islam Berkemajuan dalam Perspektif Muhammadiyah
Ayuhan Asmara

Tinjauan Islam tentang Korupsi
M. Hasan Mansjur



PERAN LEMBAGA PAUD BERBASIS ISLAM DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI DAN INTERVENSI TUMBUH KEMBANG ANAK

Suharsiwi, M.Pd

ABSTRAK

Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang memberikan letak dasar pembentukan perilaku dan keterampilan dasar anak. Sebagai peranannya yang penting untuk memberikan pondasi bagi jenjang pendidikan berikutnya, maka PAUD sangat strategis bagi proses perkembangan anak. Menjadi sangat penting peranannya, ketika dalam pelaksanaannya mendapati anak-anak yang mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Lembaga PAUD merupakan lembaga pertama yang diharapkan melakukan deteksi dini permasalahan yang terjadi pada anak dengan mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang terkait. Intervensi merupakan hal yang berikutnya yang harus dilakukan guru untuk memberikan layanan sebagai wujud dukungan pada program pendidikan inklusif di Indonesia. Program intervensi hendaknya dapat menekankan pada pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku moral agama, dimana program disusun bersama dengan melakukan komunikasi dengan orangtua, guru pembimbing khusus dan mungkin juga klinik tumbuh kembang anak, jika anak mendapatkan penanganan awal di tempat tersebut. Riwayat penanganan dapat menjadi masukan bagi guru/tutor PAUD untuk melakukan penanganan yang tepat. Situasi ideal ini memang masih jauh dari harapan, karena sedikit sekali Lembaga PAUD yang menjalankan program pendidikan inklusif di sekolahnya atau juga menerima anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Kurangnya pengetahuan menjadi alasan bagi mereka untuk tidak menolaknya. Ketika ada lembaga PAUD yang menerima-pun adalah lembaga yang memang sudah mapan dan cenderung mahal. Pemerintah dalam hal ini dapat andil mendukung program tersebut, mengingat bahwa pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus membutuhkan perangkat sarana prasarana serta pelatihan yang membekali para Tutor PAUD melakukan penanganan yang tepat bagi mereka agar dapat mereka mengembangkan diri sesuai potensi yang dimilikinya.

PENDAHULUAN

Maraknya Pendidikan Anak Usia Dini dalam beberapa tahun belakangan ini merupakan bukti nyata bagaimana perjuangan para ahli pendidikan anak usia dini mulai memperlihatkan hasilnya. Bukan hanya di kota-kota, tetapi di pedesaan juga, kesadaran masyarakat mulai tumbuh untuk memasukkan anak-anak mereka di usia yang masih belia ke lembaga pendidikan untuk anak usia dini. Tumbuhnya lembaga-lembaga PAUD baik formal, non formal dan informal juga ditunjang oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang membantunya kian berkembang di masyarakat. Keterlibatan para tutor PAUD dari tenaga sukarelawan di pos yandu dan PKK juga memberikan kesempatan yang banyak bagi anak-anak usia dini di lingkungan untuk bersekolah, yang dalam arti memberikan kesempatan bagi anak mendapatkan stimulasi dini bagi tumbuh kembangnya dengan bersosialisasi dengan teman dan guru di Lembaga PAUD.

Mengingat masyarakat kita mayoritas muslim, maka Perhatian yang besar pada pendidikan usia dini sebagai wujud keyakinan bahwa perbaikan kualitas manusia Indonesia dimasa mendatang ditentukan dari sejak usia dini. Demikian juga dalam melakukan pendeteksian permasalahan, anak-anak yang bersekolah pada usia dini akan bisa diketahui lebih awal, jika mereka ternyata mengalami berbagai hambatan fisik, emosi sosial atau gangguan perkembangan lainnya yang bisa dilihat dalam pergaulan sehari-hari anak di PAUD.

Dalam melakukan penanganan anak dengan permasalahan perkembangan anak, para pendidik di PAUD seyogyanya dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, psikolog, guru PLB atau klinik tumbuh kembang anak setempat agar dapat melakukan penanganan pendidikan yang tepat bagi mereka.

Jika sejak awal permasalahan anak sudah diketahui, guru dapat memberikan bimbingan yang tepat bagi optimalisasi perkembangannya. Contoh anak autisme dan beberapa kasus anak dengan hambatan emosi dan sosial jika dilakukan penanganan sebelum usia 6 tahun, maka kemungkinan mereka dapat tumbuh layaknya anak-anak normal lainnya lebih besar peluangnya daripada dilakukan ketika anak memasuki usia yang lebih tua.

Beberapa kasus anak berkebutuhan khusus, karena kurangnya pengetahuan orangtua, anak-anak dengan perilaku sosial, memiliki masalah komunikasi dan emosional akhirnya diabaikan dan dianggap orang yang tidak waras atau dalam kasus ekstrim dipasung oleh orangtuanya. Padahal jika sejak dini para pendidikan anak usia dini dapat berperan dalam memberikan pemahaman yang tepat pada permasalahan mereka maka intervensi dini dapat dilakukan dengan tepat pula.

Oleh sebab itu guru PAUD juga harus memiliki pemahaman tentang deteksi dini masalah tumbuh kembang anak agar mereka dapat memberikan masukan yang tepat pada orangtua mengenai problema yang tampak pada anak. Untuk itu pelatihan lebih intensif tentang deteksi dini masalah tumbuh kembang anak serta bagaimana penanganannya dapat dijadikan salah satu bahan ajar yang disampaikan untuk para tutor PAUD, dan agar lembaga PAUD dapat berperan dalam membantu menangani anak-anak berkebutuhan khusus usia dini, yang kelak dapat memberikan bekal keterampilan sosial dan pengembangan dasar yang menjadi pondasi bagi pendidikan mereka di sekolah dasar. Bagi mereka yang telah ditangani dengan baik di tingkat pendidikan anak usia dini maka akan sangat membantu guru mereka di sekolah dasar.

Meski memang keberhasilan penanganan anak berkebutuhan khusus sangat bergantung pada kasus anak yang bersangkutan. Namun setidaknya ketika anak telah diketahui permasalahannya sejak dini akan memudahkan berbagai pihak untuk melakukan berbagai antisipasi. Lembaga PAUD merupakan jenjang pendidikan prasekolah yang memberikan pondasi awal bagi pengembangan keterampilan dasar dan pembentukan sikap perilaku anak, sehingga diharapkan perannya dapat memberikan kontribusi awal bagi anak sebagai persiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Informasi yang diperoleh dari guru PAUD, dapat menjadi masukan yang sangat berarti buat guru di sekolah dasar, untuk memberikan pendidikan yang tepat bagi mereka dan dapat melanjutkan program pendidikan individual yang dijalankan guru di lembaga PAUD jika memang telah dilakukan sehingga pendidikan berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

PENGERTIAN DETEKSI DINI

Istilah Deteksi Dini, digunakan oleh Depkes RI pada tahun 1990 sebagai kata lain dari asesmen yang artinya kegiatan pemeriksaan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, untuk mengetahui ada tidaknya kecatatan dan atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan sehingga apabila ditemukan dapat segera diupayakan program-program intervensi yang tepat.

Pada bagian lain, Munawir Yusuf mendefinisikan istilah Deteksi Kelainan Anak (DKA) sebagai usaha guru dan orang tua mengetahui apakah anak didik memiliki kelainan fisik, mental, emosi, dan atau sosial.¹ Sementara itu, kata intervensi mengandung makna tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mengatasi dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, baik pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, emosi, dan atau social. Jika istilah deteksi dimaknai sama dengan asesmen, Ronald L. Taylor (Ellah, 2005), memahaminya sebagai suatu proses pengumpulan informasi atau data tentang penampilan individu yang relevan untuk mengambil keputusan.

Dari ragam pengertian seperti yang diuraikan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa deteksi perkembangan anak usia dini merupakan upaya mengetahui letak dan jenis kesulitan atau hambatan yang dialami anak usia dini dalam proses perkembangannya. Sementara itu, intervensi dapat dimaknai sebagai pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru, orang tua, dan atau ahli lain untuk mengatasi hambatan yang dialami anak dalam proses perkembangannya untuk mencapai perkembangan yang optimal.

TOLOK UKUR STANDAR DETEKSI ANAK USIA DINI

Dilihat dari tolok ukurnya, anak-anak dikatakan memiliki kesulitan atau hambatan dalam perkembangannya, jika yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan yang semestinya dilalui, serta ukuran-ukuran yang bersifat normative yang pada umumnya dapat dilakukan oleh rata-rata anak seusianya. Beragam istilah kesulitan

¹ Ellah Siti Chalidah. *Terapi Permainan bagi Anak yang Memerlukan Layanan Pendidikan Khusus*. Jakarta: Depdiknas, 2005, p.10

perkembangan anak, termasuk didalamnya kesulitan dalam tugas-tugas belajar, dinyatakan oleh para ahli. Burton (Abin Syamsuddin, 2007), misalnya menyatakan bahwa anak-anak yang tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuaian sosial sesuai dengan pola organismiknya (*his organismic pattern*) pada fase perkembangan tertentu seperti yang berlaku bagi kelompok sosial dan usia yang bersangkutan, seringkali dikategorikan ke dalam *slow learners*. Pemahaman ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau keterlambatan, seorang guru dapat merujuk pada tahap dan tugas-tugas perkembangan apa yang yang seyogyanya dilalui anak atau pada ukuran-ukuran normal yang berlaku sesuai dengan usia dan perkembangannya.² Pada bagian lain, Mulyono Abdurrahman, (2003: 9) berpandangan bahwa tumbuhnya permasalahan dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu (1) kemungkinan adanya disfungsi neurologis, (2) adanya kesulitan dalam tugas akademis, (3) adanya kesenjangan prestasi dan potensi, dan (4) adanya pengeluaran dari sebab-sebab lain. Demikian halnya dengan klasifikasi kesulitan belajar secara garis besar dibagi kedalam dua kelompok, yaitu (1) kesulitan yang berhubungan dengan perkembangan (*developmental learning disabilities*), dan (2) kesulitan belajar akademik (*academic learning disabilities*).³

Merujuk pada karakteristik atau tolok ukur permasalahan di atas, satu hal yang pasti, para pendidik, orang tua, dan atau ahli lain, semestinya memahami betul tahap dan tugas-tugas yang harus dilalui oleh anak-anak usia dini, serta ukuran atau standar normative yang harus dicapai oleh anak, baik dalam aspek fisik, intelektual, sosial, emosi, maupun perilaku. Melalui langkah ini, kemampuan guru, dan juga orang tua, dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya perkembangan yang lambat, menyimpang, dan atau perkembangan yang tidak semestinya sejak dini dan sejak usia yang belia, permasalahan anak dapat diketahui. Kondisi seperti ini, pada gilirannya akan memudahkan guru, orang tua, dan atau pihak lain yang relevan melakukan intervensi sesuai dengan karakteristik perkembangan yang dialami oleh anak usia dini tersebut.

² Abin Syamsudin Makmun. (1996). *Psikologi Kependidikan. Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung: Rosda Karya, p.

³ Mulyono Abdurrahman (2003), *Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, p.

INTERVENSI DINI DI PAUD

Intervensi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan deteksi pada anak usia dini. Intervensi bermakna pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru, orang tua, dan atau ahli lain untuk mengatasi hambatan yang dialami anak dalam proses perkembangannya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Setelah diagnosis diperoleh melalui deteksi yang dilakukan, maka pimpinan dan guru di lembaga PAUD dapat bekerjasama dengan orangtua, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti psikolog, terapis atau guru pembimbing khusus yang melakukan penanganan anak di luar jam sekolah. Jika anak mengikuti program layanan di klinik tumbuh kembang anak, maka guru mendapatkan masukan bagi penanganan anak di lembaga PAUD.

Guru dan orangtua selanjutnya dapat menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan program pengembangan individual yang memang disesuaikan dengan kemampuan anak. Orangtua biasanya paling memahami kondisi anak, Guru dapat bekerjasama membuka komunikasi agar anak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Guru juga dapat membuka pemikiran orangtua agar tuntutan yang diberikan pada anak disesuaikan dengan kemampuannya, sehingga anak tidak tertekan atau terbebani oleh banyaknya tuntutan dari orangtua. Sekolah juga dapat mengoptimalkan kemampuan anak, karena programnya telah disesuaikan.

Program intervensi hendaknya dapat menekankan pada pengembangan kemampuan dasar seperti bahasa, kognitif, fisik motorik dan sosial emosional. Pada Aspek bahasa, ditekankan pada keterampilan menyimak dan berbicara, sementara keterampilan membaca dan menulis adalah keterampilan yang dikenalkan tapi tidak menjadi sesuatu yang dikejar dan harus segera dimiliki oleh anak. Demikian juga pada aspek kognitif, kegiatan difokuskan pada pengembangan daya pikir anak dalam berlatih berkonsentrasi, mengenal konsep-konsep sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan anak, terutama apabila anak berkebutuhan khusus rata-rata mengalami masalah dalam perkembangan bahasa dan berfikirnya.

Aspek fisik motorik bagi anak berkebutuhan khusus juga tidak boleh dikesampingkan, bahkan kemampuan ini harus dikembangkan. Anak-anak yang

mengalami masalah dalam berkonsentrasi dan hiperaktifitas, maka pengembangan motorik akan membantunya menyalurkan energi negatif dalam dirinya untuk hal-hal yang positif. Diharapkan mereka dapat menjaga keseimbangan tubuh, lebih fokus pada tugas-tugas dan lebih tenang. Kegiatan fisik motorik dapat dilakukan anak baik di luar ataupun di indoor dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan sensory integrasi.

Perkembangan sosial emosional juga merupakan keterampilan yang harus dilatih untuk mengembangkan kemampuan anak bersosialisasi agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Anak-anak ini dapat diajarkan keterampilan sederhana dalam bersosialisasi, seperti bagaimana mereka berkomunikasi, melakukan kontak sosial dan juga mengembangkan emosi yang sehat. Tumbuhnya sosial emosional yang sehat akan menjadikan mereka pribadi yang mandiri dan sehat karena mendapatkan penerimaan yang positif dari lingkungannya.

Penanaman Moral dan Agama, untuk anak berkebutuhan khusus bukannya tidak bisa dilakukan, namun harus tetap ditanamkan sejak dini. Anak-anak berkebutuhan dapat dilatih pembiasaan sederhana berkaitan dengan moral agama. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti berdo'a setiap sebelum dan sesudah kegiatan, mengucapkan salam, bersalaman, makan dengan tangan kanan, wudhu, sholat dan kebiasaan lain yang memang bisa dilakukan oleh anak. Penanaman aqidah dilakukan dengan pengenalan kepada Asma Allah dan penanaman identitas anak sebagai seorang muslim.

LEMBAGA PAUD DAN PERANNYA SEBAGAI LEMBAGA INKLUSI

Pendidikan Inklusi menurut Mulyono adalah sebuah implementasi dari pengakuan kebhinnekaan antar manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian kepada Tuhan Yang Esa.⁴

Penyelenggaraan pendidikan Inklusi di Indonesia adalah merupakan konsekuensi logis karena Indonesia termasuk salah satu negara yang turut

⁴ Mulyono Abdurrahman, *Makalah Pendidikan Inklusif pada Seminar Nasional "Pendidikan Inklusi Ramah Untuk Semua"*, Jakarta, 2007

menandatangani pada Deklarasi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua, dimana salah satu tujuannya adalah memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. Salamanca Statement menyatakan “*education systems should take into account the wide diversity of children’s different characteristics and needs*”.⁵

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak, bahwa setiap anak apapun kondisinya bisa diajarkan sesuai kemampuan dan kelebihannya, dan di negara ini setiap anak berhak bersekolah di manapun ia mau. Lembaga PAUD sangat pentingnya dalam mendukung program pendidikan untuk semua, sebagai isu pendidikan inklusif tersebut. Dengan daya jangkau yang memang lebih meluas sampai masuk di wilayah yang dekat dengan masyarakat, Lembaga PAUD seyogyanya dapat menjadi lembaga pertama yang melakukan deteksi awal bagi anak-anak dengan gangguan perkembangan.

Namun seakan masih bermimpi sejak ditandatangani Salamanca Statement tahun 1994 yang ditetapkan pada konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994, Sampai saat ini pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih belum tertangani secara optimal dan menyeluruh. Meski memang berbeda masalahnya pada tiap jenjang pendidikan berkaitan dengan permasalahan pendidikan inklusi di Indonesia, lembaga PAUD masih belum tersosialisasi bagi penanganan anak berkebutuhan khusus. Baik pengelola, maupun tenaga pendidik belum mendapatkan bekal bagaimana menangani mereka. Masih terlalu banyak PR Pemerintah dalam melakukan pengelolaan lembaga PAUD di masyarakat, dari SDM, sarana prasarana serta program pembelajaran yang memang masih perlu diperbaiki pelayanannya mengingat status pendidikan para tutor, yang rata-rata berpendidikan SMA, bahkan ada yang kurang dari itu, terutama yang berada di daerah pelosok dan pinggiran kota.

Minimnya pengetahuan para tutor seringkali membuat mereka enggan menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan layanan pada pendidikan yang

⁵ *Draf Model Pembelajaran ABK Usia Dini*, PUSKUR Depdiknas, Jakarta, 2007

sesuai dengan kebutuhannya dan masih banyak orangtua kesulitan mencari sekolah buat putra-putrinya karena sering mengalami penolakan dari sekolah.

Kondisi tersebut bisa terjadi karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas pelayanan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Demikian pula tenaga pendidikan kualitas. Sehingga baik secara skill maupun mental, guru belum siap untuk menerima anak berkebutuhan khusus di kelas mereka. Sepertinya orangtua harus berjuang keras sendiri mengatasi persoalan ini, mereka harus berjuang untuk dapat meyakinkan pihak sekolah agar dapat menerima anaknya bersekolah di tempat mereka.

Beberapa lembaga PAUD seperti Play Group atau TK yang cukup bonafid dan lengkap fasilitas, menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Namun kendala tersendiri dari orangtua adalah bagaimana harus mengatasi persoalan keuangan mengingat menyekolahkan anak dengan kebutuhan khusus memerlukan pembiayaan yang besar. Contoh saja orangtua yang memiliki anak autis, mereka harus mengeluarkan isi koceknya per bulan untuk biaya sekolah minimal 2 juta karena harus menggaji guru pendamping sendiri, dan itu belum lagi biaya terapi jika anak masih harus mengikuti sejumlah terapi yang disarankan oleh psikolog atau dokter anaknya.

Setelah anak diterimapun orangtua di sekolah-sekolah yang mencanangkan diri sebagai sekolah inklusif, orangtua juga harus memperjuangkan fasilitas pendidikan yang layak karena beberapa sekolah kesulitan mencari guru pendamping sehingga orangtua harus mencari sendiri, demikian juga program pengembangan individual, karena banyak sekolah yang belum memahami bagaimana melakukan penanganan dalam standar minimal sebuah sekolah inklusi, sehingga ketika mereka mencanangkan diri inklusi hanya karena mereka menerima anak berkebutuhan khususnya di sekolah, sementara penanganannya tidak memenuhi syarat sebagai sekolah inklusi.

BUTUH PERHATIAN SERIUS

Peraturan Gubernur No. 116 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dalam Bab III pasal 4 bahwa penyelenggaraan

pendidikan inklusi di setiap Kecamatan sekurang -kurangnya terdapat 3 (tiga) TK/RA, SD/MI, dan satu SMP/MTS dan disetiap Kota sekurang-kurangnya 3(tiga) SMU/SMK/MA/MAK. ⁶

Namun kenyataannya jumlah TK/RA , SD Inklusi Negeri di Jakarta masih kurang dari jumlah yang telah ditetapkan yaitu setiap kecamatan sekurang- kurangnya 3 (tiga) TK/RA, SD/MI. Faktanya di 2 (dua) wilayah terpadat yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Timur jumlah sekolah di tiap kecamatan belum mencukupi. Contoh di Jakarta Selatan yang memiliki 10 Kecamatan, hanya ada 8 (delapan) SD dan 2 (dua) TK Negeri, seharusnya terdapat sekurang-kurangnya 30 TK dan 30 SD/MI. Demikian juga di wilayah Jakarta Timur, dari 10 kecamatan yang dimiliki, hanya terdapat 9 (sembilan) dan 1 (satu) TK negeri.

Menurut catatan Wanda Hamidah, anggota komisi E DPRD DKI Jakarta bahwa angka siswa yang mengalami hambatan belajar/kesulitan belajar karena Dislexia, ADHD (Attention Defisit Hiperaktif Disorder), ADD (Attention Difisit Disorder), dan Autis, diperkirakan sekitar angka pravelensi 10% dari total jumlah siswa. sehingga diperkirakan ada lebih 50.000 anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa tertampung di sekolah inklusi di DKI Jakarta. ⁷

Bagi orangtua yang mampu mereka dapat menyekolahkan anak di sekolah di TK dan SD Inklusi yang dikelola oleh swasta, sementara bagi orangtua yang tidak mampu kemungkinannya adalah orangtua mendidiknya dirumah atau tidak menyekolahkannya.

Selain masalah jumlah sekolah yang terbatas jumlahnya, masalah teknis penanganan anak berkebutuhan khusus juga menjadi kendala di lapangan seperti dukungan tenaga ahli, guru pembimbing khusus dan sarana prasarana yang mendukung bagi sekolah untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya.

Maraknya TK dan SD Inklusi yang dikelola oleh swasta dengan biaya yang melangit dan terkadang hal tersebut hanya dijadikan komoditi bisnis sementara fasilitas yang diberikan sangat minimalis untuk anak

⁶ Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 116 Tahun 2007

⁷ wandahamidah.blogdetik.com

Jumlah guru pendamping anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi masih sangat terbatas, seperti sebuah SD Negeri inklusi di Jakarta timur, jumlah anak berkebutuhan khusus di sana sekitar 30 orang, sementara guru pembimbing khususnya hanya ada 1 orang, itupun hanya guru honorer.

Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus tersebut, yang jelas mereka pasti akan *keleleran* dan tidak tertangani dengan baik. Ada juga 1 (satu) guru pembimbing khusus yang membantu beberapa SD Negeri Inklusi. Walau ada juga ditemukan sebuah SD model di Jakarta Timur, dimana penanganan anak berkebutuhan khusus ditangani oleh guru pembimbing khusus dengan biaya yang dikeluarkan dari orangtua.

Kondisi-kondisi tersebut menjadi cerminan potret pendidikan inklusi di DKI Jakarta yang notabene merupakan juga potret dari keseluruhan program inklusi di Indonesia, karena jika di Jakarta saja program ini belum tertangani dengan baik apalagi di daerah, bahkan ada beberapa wilayah dimana belum terdapat sekolah inklusi. Sementara Lembaga PAUD, masih belum dilakukan survey, berapa lembaga PAUD yang memang sudah menerima anak berkebutuhan khusus dan melayani dengan standar pelayanan pendidikan inklusif. Mengingat problem yang dihadapi lembaga PAUD, dan survey kecil-kecilan yang dilakukan peneliti ketika melakukan pelatihan tentang deteksi dini dan intervensi ABK pada guru-guru PAUD di wilayah Tangerang Selatan, hampir bisa dipastikan mereka belum melakukan penanganan dengan tepat pelayanan ABK di lembaga PAUD-Nya bahkan ada beberapa yang menolak lantaran tidak sanggup melayani mereka.

Belum tersedianya tenaga pembimbing khusus tetap, bisa jadi karena ketiadaan dana yang mencukupi bagi penyelenggaraan sekolah inklusi. Seharusnya sebagai wujud dari komitmen pada Statement Salamanca, yang turut di tanda tangani oleh Indonesia, maka biaya yang diperlukan dalam penanganan anak berkebutuhan khusus tersebut harus menjadi perhatian dari pemerintah dan di anggarkan sesuai kebutuhan standar minimal sebuah penyelenggaraan sekolah inklusi, dan tenaga pembimbing khusus adalah sebuah standar minimal dalam menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah. Terkhusus sebagai basic bagi Intervensi dini bagi anak berkebutuhan khusus, maka Lembaga PAUD

hendaknya mendapat prioritas bantuan baik fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Biaya yang diperlukan itu meliputi peningkatan mutu dengan melakukan sejumlah pelatihan, pengadaan ruang bimbingan individual, media dan alat peraga serta sarana pendukung kegiatan belajar mengajar untuk anak berkebutuhan khusus yang ditampung di lembaga tersebut. Dana yang diperlukan memang besar, tetapi mengingat jumlah siswa berkebutuhan khusus tidak sebanyak siswa lainnya. Sementara kesulitan yang dihadapi besar, sehingga keterlibatan pemerintah diharapkan agar angka partisipasi siswa berkebutuhan khusus untuk bersekolah jumlahnya semakin banyak.

Faktanya memang anggaran dana pendidikan inklusi menurut Wanda Hamidah untuk seluruh wilayah DKI Jakarta kurang dari 2(dua) Milyar Rupiah. Dana tersebut tidak mencukupi kebutuhan penyelenggaraan sekolah inklusi, kalau memperhatikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 116 Tahun 2007. Dana tersebut memang terasa masih jauh jika dibandingkan dengan pengadaan seragam guru (PDH dan ongkos jahit) sebesar 12,119 Milyar rupiah. Wajar jika penyelenggaraan pendidikan Inklusi masih setengah hati. Sekolah menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah, tetapi siswa harus membiayai sendiri tenaga pendamping khususnya bagi anaknya. Hal ini akan menjadi miris jika orangtua tidak mampu membiayai maka anak akan bersekolah tanpa penanganan yang seharusnya.

Sehingga apa fungsi dari penancangan sekolah inklusi di Indonesia jika akhirnya orangtua harus menanggung sendiri beban masalah anak mereka yang "*special*" dan pendidikan untuk semua hanya sebuah slogan, karena ternyata pendidikan hanya diperuntukkan bagi yang mampu dan "normal". Kita bisa melihat bagaimana penanganan anak berkebutuhan khusus di beberapa negara, dimana melalui pendidikan yang baik, banyak dari anak-anak berkebutuhan khusus dapat berkembang dengan baik dan bisa berkarya di masyarakat.

Contohnya juga anak-anak dengan kasus spektrum autisme, jika ditangani di usia yang masih belia, maka beberapa kasus mereka dapat belajar dengan normal bersama anak-anak yang lain tanpa bimbingan khusus di kelas 1 Sekolah Dasar.

Untuk itu penanganan anak berkebutuhan khusus sudah seharusnya sudah menjadi perhatian sejak usia dini, dan dilakukan secara berkelanjutan sampai tingkat perguruan tinggi, dan seyogyanya penanganan anak berkebutuhan khusus menjadi tanggung jawab negara sebagaimana juga tanggung jawab negara pada pendidikan untuk orang-orang miskin dan anak-anak terlantar.

Pemerintah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam menyiapkan tenaga pendidik khusus dengan membuka jurusan pendidikan luar biasa untuk perguruan tinggi negeri yang belum memiliki jurusan tersebut, dan bagi perguruan tinggi yang telah memiliki jurusan pendidikan luar biasa diharapkan, pendidikan inklusi dan penanganan anak berkebutuhan khusus dapat dimasukkan dalam mata kuliah untuk calon guru PAUD atau SD, maupun calon guru bidang studi, sehingga kelak mereka dapat siap melakukan penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah tempat mereka bekerja kelak.

Sudah sewajarnya biaya tersebut masuk dalam anggaran pemerintah baik di APBN dan APBD. Sehingga ketika kebijakan pendidikan inklusi sudah dicanangkan maka segala perangkat yang diperlukan dapat segera disiapkan. Jika pendidikan terselenggara tanpa fasilitas yang diperlukan malah akan menyengsarakan anak. Anak berkebutuhan khusus tidak tertangani dengan baik karena tidak ditangani oleh ahlinya, dan tidak ditunjang oleh media belajar yang diperlukan. Skill mengajar juga tidak bisa ditingkatkan karena ketiadaan dana yang mencukupi.

Selain pendanaan yang harus dianggarkan oleh pemerintah dengan melihat kebutuhan yang ada, pemerintah juga bisa membuat terobosan dengan melibatkan perusahaan swasta untuk melalui program CSR-nya. Peran akademisi juga diharapkan dukungannya dengan memberikan sumbangan riset yang diperlukan dalam mengembangkan model untuk penunjang pada pembelajaran anak berkebutuhan pada sekolah inklusif.

PENUTUP

Problematika pendidikan inklusi memang menjadi potret dari keseluruhan problema pendidikan kita. Namun jangan karena adanya pendapat bahwa

“mengurusi yang normal saja susah apalagi anak yang luar biasa”, membuat pembenaran bagi pengabaian pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sebagai guru yang sering berkomunikasi dengan orangtua anak berkebutuhan khusus dan sebagai orangtua yang pernah memiliki anak berkebutuhan khusus, memang rasanya pernyataan tersebut tidak adil. Apalagi jika ada penolakan dari sekolah karena anak-anak berkebutuhan khusus ini memberi dampak buruk bagi anak-anak yang lain, hal tersebut juga dirasakan sebagai bentuk diskriminasi.

Agar pendidikan dapat dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus formula pendidikan inklusi harus menjadi perhatian yang serius agar pendidikan dapat menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan karakteristik anak. Perbaikan tersebut dapat dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, melalui peran serta guru dalam melakukan deteksi dan intervensi dini bagi permasalahan anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan di usia yang lebih muda diharapkan dapat lebih berkembang dengan baik, karena mereka masih lentur dalam mempelajari berbagai keterampilan dasar. Sehingga jika dari sejak dini permasalahan anak telah diketahui, dan anak telah mendapat pendidikan yang tepat, tidak menutup kemungkinan anak dengan permasalahan tumbuh kembang dapat teratasi di usia yang masih belia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kerangka Dasar Kurikulum Anak Usia Dini* (Departemen Pendidikan nasional, 2007)
- Mulyono Abdurrahman, *Makalah Pendidikan Inklusif pada Seminar Nasional "Pendidikan Inklusi Ramah Untuk Semua"*, Jakarta, 2007
- Draf Model Pembelajaran ABK Usia Dini*, PUSKUR Depdiknas, Jakarta, 2007
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 116 Tahun 2007
- Abin Syamsudin Makmun. (1996). *Psikologi Kependidikan. Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung: Rosda Karya
- Ellah Siti Chalidah. (2005). *Terapi Permainan bagi Anak yang Memerlukan Layanan Pendidikan Khusus*. Jakarta: Depdiknas
- Mulyono Abdurrahman. (2003) *Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Munawir Yusuf, (2005), *Pendidikan bagi Anak dengan Problema Belajar*, Jakarta: Depdiknas